

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Setiap negara memiliki keadaan yang berbeda dari negara satu dengan yang lain. Mulai segi budaya, bahasa, adat, ciri khas, social politik hingga perekonomian. Masing-masing negara memiliki tingkat perekonomian yang dapat dihitung secara keseluruhan dari banyaknya penghasilan setiap individu maupun organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar untuk meningkatkan kemajuan maupun mempengaruhi perkembangan suatu negara. Banyak negara saling bersaing meningkatkan perekonomian mereka untuk mempertahankan pangsa pasar dan produk negara mereka. Perekonomian suatu negara merupakan tindakan pengalokasian atau tindakan memproduksi sumber daya yang telah tersedia di suatu negara yang diolah oleh individu maupun organisasi dengan diawasi oleh sistem pemerintahan suatu negara tersebut. Pemerintah di dalam suatu negara memiliki hak dan ikut andil dalam mengatur alokasi dan produksi sumber daya hingga menghasilkan.

Ketika sumber daya yang diolah oleh individu maupun organisasi memberikan penghasilan maka penghasilan tersebut dapat ditransfer ke dalam pemerintahan negara sehingga dapat dikatakan pendapatan suatu negara merupakan bagian dari penghasilan yang telah dipotong sesuai aturan untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara agar struktur ekonomi suatu negara tetap stabil sehingga negara mampu membangun negara yang maju dan pemerintahan negara mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat. Aturan pemotongan penghasilan dari setiap individu maupun organisasi merupakan aturan yang telah dibuat pemerintah atau kebijakan pemerintah yang disebut pajak. Pajak juga dapat dikatakan pungutan wajib atas penghasilan yang dibayar oleh individu maupun organisasi yang berada dalam lingkup suatu negara dan pungutan tersebut digunakan oleh pemerintah

dan seluruh masyarakat umum sehingga pajak yang telah dibayarkan bukan hanya memberikan manfaat untuk pribadi bagi pembayar namun memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat karena tujuan pungutan pajak untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi.

Banyak negara memiliki perekonomian maju seperti salah satu negara yang mendapatkan julukan “Macan Asia” ialah negara Singapura. Singapura merupakan salah satu negara dengan ekonomi yang maju dan pusat pertukaran mata uang asing terbesar keempat di dunia setelah London, New York dan Tokyo. Bank Dunia menempatkan Singapura pada peringkat hub logistik teratas dunia. Ekonomi Singapura termasuk di antara sepuluh negara paling terbuka, kompetitif dan inovatif di dunia. Dianggap sebagai negara paling ramah bisnis di dunia, ratusan ribu ekspatriat asing bekerja di Singapura di berbagai perusahaan multinasional. Singapura juga terkenal dengan nama kota tujuan perjalanan. Singapura memiliki industri pariwisata yang berkembang baik, dengan lebih dari 8 juta pengunjung pada tahun 2004. Sebagai kota kosmopolitan yang menonjolkan perbedaan ras dan budaya yang harmonis, banyak pengunjung mengunjungi Singapura sebagai tujuan, bukan hanya sebagai batu loncatan atau tempat transit. Singapura telah tercatat di antara wisatawan mancanegara sebagai tujuan wisata yang menarik, membuat pariwisata salah satu dari industri besar di Singapura. Selama bertahun-tahun dianggap sebagai pusat bisnis di Asia Tenggara, Singapura memiliki daerah perbelanjaan yang berkembang yang terletak di distrik Orchard Road. Dipenuhi dengan beberapa pusat perbelanjaan, daerah ini juga memiliki banyak hotel, dan dianggap banyak orang sebagai pusat pariwisata Singapura.

Singapura termasuk dalam 10 besar negara dengan pendapatan perkapita tertinggi sedunia pada tahun 2014. Dengan didukung iklim investasi yang sangat menarik bagi para pengusaha dan juga suhu politik yang relatif stabil, Negara Singapura terdepan jika dibandingkan negara-negara Asean lainnya.

Selain itu, Singapura juga dikenal sebagai negara dengan angka korupsi paling kecil dan negara yang paling pro dengan bisnis. Meski tarif pajaknya terendah se-Asean, kepatuhan dan tax ratio Singapura tergolong tinggi, dengan otoritas perpajakan yang ditakuti sekaligus disegani (Kumalasari, 2017).

Undang-undang Pajak Penghasilan di Singapura adalah perundang-undangan yang mengatur mengenai hal perpajakan badan dan individu. *The Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)* didirikan pada tahun 1960 dan dikenal sebagai *the Inland Revenue Department*. Terlepas dari kenyataan bahwa perpajakan di Singapura diatur dengan baik, kompetitif dan dilengkapi dengan banyak insentif pajak, sangat penting untuk membuat perencanaan pajak di Singapura untuk perencanaan bisnis dan investasi. Perencanaan pajak yang tepat membantu bisnis mengurangi kewajibannya dan menikmati keuntungan bisnis maksimum (Kumalasari, 2017).

Indonesia merupakan negara yang memiliki ekonomi berkembang yang mana pajak menjadi pendapatan pertama bagi Indonesia. Segala pembangunan sarana yang menunjang infrastruktur dan ekonomi bisa dibangun karena adanya dana dari pembayaran pajak (Prasetyo, 2017). Di Indonesia, pajak dikategorikan berdasarkan tiga hal. Pertama, berdasarkan golongan atau cara pemungutannya (pajak langsung dan pajak tidak langsung). Kedua, berdasarkan sifatnya (pajak subjektif dan pajak objektif). Ketiga, berdasarkan lembaga pemungutannya (pajak pusat dan pajak daerah) (Siahaan, 2017). Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia merupakan self assessment system yang merupakan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan sendiri oleh wajib pajak. Dengan sistem tersebut wajib pajak harus aktif menghitung, menyetor dan melaporkan kepada kantor inspeksi pajak. Sedangkan, fiscus hanya bertugas memberikan penerangan, pengawasan dan sebagai verifikator (Setiawan, 2019).

Perbedaan pemungutan tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan antara Singapura dan Indonesia memiliki selisih 8%, yaitu tarif pajak Wajib Pajak Badan di Indonesia dikenakan tarif 25% sedangkan di Singapura hanya 17%. Menurut menteri keuangan Bambang Brodjonegoro (2015) menyatakan bahwa Singapura memiliki tarif pajak rendah karena Singapura tidak memiliki beban berat dengan penduduk yang lebih sedikit dan wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia. Letak Singapura yang strategis di tengah Asia yang berada di persimpangan antara perdagangan Timur dan Barat sehingga memiliki lokasi yang baik dan stabil untuk investasi dan bisnis.

IRAS e-Tax Guide menyatakan perencanaan pajak merupakan proses menyusun transaksi atau serangkaian transaksi untuk meminimalkan kewajiban seseorang terhadap pajak, dan biasanya memenuhi persyaratan hukum dan maksud dari undang – undang pajak penghasilan. Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh dengan cara, mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3. Martono dan Harjito (2010:13) menyatakan bahwa memaksimalkan nilai perusahaan disebut sebagai memaksimalkan kemakmuran pemegang saham (*stakeholder wealth maximation*) yang dapat diartikan juga sebagai memaksimalkan harga saham biasa dari perusahaan (*maximizing the price of the firm's common stock*). Perusahaan bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh shareholder maupun stakeholder. Perusahaan harus mampu memenuhi segala permintaan dari stakeholder untuk terus meningkatkan kinerja sehingga stakeholder terus memberikan kepercayaan dan memberikan dorongan melalui investasi. Salah satu, kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan ialah mematuhi kewajiban sebagai wajib pajak ketika pajak telah mampu diatasi dengan perencanaan pajak yang dapat meminimalkan beban atas penghasilan. Perusahaan dapat mempertahankan

laba mereka dan dapat menjaga nilai perusahaan mereka. Selain itu, pengungkapan sukarela dapat dikatakan mampu mengurangi tingkat asimetri informasi diantara manajer dan pemilik perusahaan serta investor. Bushman dan Smith (2003) mengemukakan transparansi perusahaan merupakan ketersediaan informasi yang beredar luas dan bisa dipercaya terhadap kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu, posisi keuangan, kesempatan investasi, pemerintah, nilai serta resiko perusahaan yang sifatnya umum. Transparansi perusahaan yang dimaksud ialah transparansi dari informasi yang diharapkan mampu membantu mengurangi dari masalah agensi yang ada maupun konflik keagenan diantara pemegang kepentingan (Armstrong *et.al*, 2010).

Penelitian terdahulu terkait pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan mempunyai arah yang bervariasi (negatif dan positif). Penelitian yang menemukan hubungan negatif perencanaan pajak dengan nilai perusahaan yaitu Wahab *et.al*. (2012) dan Hanlon dan Slemrod (2009). Pengaruh negatif ini, menunjukkan bahwa manajerial cenderung berperilaku oportunistik dalam melakukan aktivitas perencanaan pajak sehingga menurunkan nilai perusahaan serta *benefit* yang diperoleh lebih kecil daripada *cost* yang dikeluarkan maupun resiko terdeteksinya lebih tinggi. Adapun penelitian yang menemukan pengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan diantaranya, Wilson (2009), Wang (2010) dan Martani *et.al*. (2012) menemukan hubungan positif antara *tax planning* dengan nilai perusahaan. Ditemukannya hubungan positif tersebut, dapat dikatakan manajerial melakukan perencanaan pajak dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan *benefit* yang diperoleh lebih besar daripada *cost* maupun risikonya. Referensi lain dari penelitian ini adalah penelitian dari Herawati dan Ekawati (2016) dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan” dengan hasil yang signifikan antara hubungan perencanaan pajak dan nilai perusahaan, dikarenakan setiap perencanaan pajak yang dilakukan memiliki dampak langsung terhadap nilai laba per saham

perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian Lestari (2014) dengan judul yang sama “Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan” menemukan pengaruh positif aktivitas perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Dengan semakin baiknya perusahaan dalam melakukan aktivitas perencanaan pajak akan semakin meningkatkan nilai perusahaan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini bukan hanya menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan namun penelitian ini menambahkan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. Adapun penelitian yang menambahkan transparansi perusahaan sebagai variabel pemoderasi dengan variabel yang sama dari Noviari (2017) dan Fajrin *et.al* (2018) yang bisa dijadikan referensi. Perbedaan penelitian ini adalah dimana penelitian sebelumnya meneliti pada perusahaan sub sektor industry barang konsumsi dan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian ini akan meneliti perusahaan yang bergerak dalam bidang industri perhotelan yang terdaftar di SGX (Singapore Exchange) atau Bursa Efek Singapura dan sub sektor perhotelan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) sekaligus membandingkan antara SGX dan BEI.

Penelitian ini dilakukan karena peneliti tertarik dengan negara Singapura yang merupakan negara dengan sebutan kota tujuan perjalanan dan juga banyak bisnis yang telah berdiri di Singapura sehingga dapat menarik para wisatawan dan investor untuk menikmati destinasi di Singapura dan melakukan perjalanan bisnis serta investasi. Kegiatan tersebut menurut peneliti dapat memberikan kontribusi besar pada pendapatan hotel di Singapura sehingga peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh perencanaan pajak untuk laporan keuangan hotel sehingga mampu memberikan pengaruh positif serta memotivasi perusahaan untuk patuh terhadap pajak dan meningkatkan nilai perusahaan ditambah dengan adanya transparansi perusahaan yang dapat membantu memperkuat tujuan perusahaan karena transparansi perusahaan mampu memberikan dan

menyediakan informasi untuk para pemegang saham. Selain itu, penelitian ini tidak hanya penelitian perhotelan yang terdaftar di SGX tetapi perhotelan yang terdaftar di BEI yang mana pada Tahun 2016 Menteri Pariwisata Indonesia mengatakan bahwa sektor pariwisata yang di dalamnya juga termasuk sub sektor perhotelan merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar kedua setelah industri kelapa sawit sehingga Indonesia juga memiliki banyak destinasi yang dapat menarik investor dan wisatawan seperti negara Singapura meskipun terdapat perbedaan dalam pemungutan pajak. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis kembali pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. Serta, membandingkan seberapa besar perbedaan pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan perhotelan di Singapura dan di Indonesia.

## **1.2. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

- 1.2.1. Berapa besar pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dari sub sektor perhotelan di SGX dan BEI ?
- 1.2.2. Berapa besar transparansi perusahaan mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dari sub sektor perhotelan di SGX dan BEI ?
- 1.2.3. Berapa besar perbedaan pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dari sub sektor perhotelan di SGX dan BEI ?
- 1.2.4. Berapa besar perbedaan transparansi perusahaan mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dari sub sektor perhotelan di SGX dan BEI ?

### **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Sehingga, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1.3.1. Mengetahui besarnya pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dari sub sektor perhotelan di SGX dan BEI
- 1.3.2. Mengetahui besarnya transparansi perusahaan mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dari sub sektor perhotelan di SGX dan BEI
- 1.3.3. Mengetahui besarnya perbedaan pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dari sub sektor perhotelan di SGX dan BEI
- 1.3.4. Mengetahui besarnya perbedaan transparansi perusahaan mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dari sub sektor perhotelan di SGX dan BEI

### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sehingga penelitian ini mengindikasikan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis.

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah kepada masyarakat tentang perbedaan pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan ditambah dengan adanya transparansi perusahaan yang akan memperkuat hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan di SGX dan BEI.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 bagian kepada pihak – pihak yang terkait dan sesuai kepentingan masing – masing. 3 bagian itu adalah sebagai berikut.



#### *1.4.2.1. Bagi Perusahaan*

Penelitian ini diharapkan memberikan pedoman bagi perusahaan karena dengan penelitian ini dapat membuktikan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan tersebut. Perusahaan juga dapat mengetahui reaksi pemegang saham dan menambah kepercayaan terhadap stake holder setelah adanya transparansi perusahaan sebagai penguat untuk melakukan perencanaan pajak sehingga perusahaan juga patuh terhadap kewajiban pajak dan meningkatkan nilai perusahaan.

#### *1.4.2.2. Bagi Akademik*

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan secara akademik sehingga dapat bermanfaat untuk bahan kajian di dalam akademisi tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi terutama dalam bidang ekonomi sangat berguna untuk menambah pengetahuan dan ilmu tentang perbedaan perpajakan di negara Singapura dan Indonesia.

#### *1.4.2.3. Bagi Pemerintah*

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi pemerintahan karena dengan adanya penelitian empiris ini para wajib pajak dapat membayar pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang telah ditetapkan sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan negara.